



---

## PENTINGNYA METODE SMART POWER GUNA MENUMPAS GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH PAPUA YANG AMAN DAN KONDUSIF

Ruli Nuryanto  
[ruli.parikesit@gmail.com](mailto:ruli.parikesit@gmail.com)

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia,

**Abstract.** *The situation in Papua demands careful evaluation, especially with the increasing attacks Separatist Terrorist Group (KST). The Smart Power concept, which combines hard power and soft power in accordance with Joseph Nye's theory, is applied through various military, diplomatic and development operations. This research aims to analyze the integrated deployment of TNI's Trimatra forces to support the implementation of the Smart Power method, as well as identify the influence of budget constraints, infrastructure, communication, and security threats on the effectiveness of the strategy. Qualitative research methods used to gain an understanding of the interactions between the various elements involved. The results showed strong coordination between various dimensions of the TNI and synergy with the local government and communities were critical to success of the operation. Limited resources affect the effectiveness strategy's implementation, while unsynergistic communication between the government and community impacts security stability. In addition, security threats such as acts of terrorism reinforce the urgency of applying Smart Power methods appropriately and effectively. In conclusion, despite many challenges, implementation of Smart Power with the right combination of military and diplomatic strategies can improve stability and security in Papua, by prioritizing optimal collaboration between the TNI, the government and the community.*

**Keywords:** *Papua, Smart Power, Armed Separatist Movement, Terrorist Separatist Group.*

**Abstrak.** Situasi di Papua menuntut evaluasi yang cermat, khususnya dengan meningkatnya serangan Kelompok Separatis Teroris (KST). Konsep *Smart Power*, yang menggabungkan *hard power* dan *soft power* sesuai dengan teori Joseph Nye, diterapkan melalui berbagai operasi militer, diplomatik, dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengerahan kekuatan Trimatra TNI secara terintegrasi guna mendukung penerapan metode *Smart Power*, serta mengidentifikasi pengaruh keterbatasan anggaran, infrastruktur, komunikasi, dan ancaman keamanan terhadap efektivitas strategi tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai interaksi antara berbagai elemen yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antara berbagai matra TNI dan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan operasi. Keterbatasan sumber daya mempengaruhi efektivitas implementasi strategi ini, sementara komunikasi yang tidak sinergis antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada stabilitas keamanan. Selain itu, ancaman keamanan seperti aksi terorisme memperkuat urgensi penerapan metode *Smart Power* secara tepat dan efektif. Kesimpulannya, meskipun terdapat banyak tantangan, penerapan *Smart Power* dengan kombinasi strategi militer dan diplomatik yang tepat dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua, dengan mengedepankan kolaborasi yang optimal antara TNI, pemerintah, dan masyarakat.

**Kata kunci:** Papua, *Smart Power*, Gerakan Separatis Bersenjata, Kelompok Separatis Teroris.



## 1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Operasi Militer Perang (OMP). Salah satu penjabaran tugas TNI dalam OMSP adalah mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata. Sebagai negara dengan berbagai macam etnis, agama dan budaya, munculnya fenomena Gerakan Separatis Bersenjata di Papua ini tentunya memicu berkembangnya masalah politik, sosial dan keamanan yang signifikan. Sehingga Integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terancam. Tentunya hal ini menjadi masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi TNI, sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945, untuk bisa menekan dan menumpas Gerakan Separatis Bersenjata Papua tersebut sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas pokok TNI, yang merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk didalamnya adalah mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif.

Seperti kita ketahui bahwa selama beberapa waktu terakhir, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, wilayah Papua yang berada di ujung timur Indonesia telah menjadi perhatian. Pentingnya penilaian dalam mengelola situasi di Papua ditekankan, terutama mengingat serangan KST yang semakin parah. Standarisasi sarana dan prasarana merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengedepankan konsep *Smart Power*, bersama dengan peningkatan fasilitas dan alutsista TNI lainnya. Ketika serangan KST menimbulkan korban sipil, tindakan harus segera dilakukan. Untuk menghindari kejahatan KST, Satgas Pamantas Damai Cartenz 2023 dan Polda Papua meningkatkan keamanan di sembilan wilayah operasi melalui patroli intensif dan identifikasi dini. Panglima TNI memahami peran teknologi dalam penanganan konflik. Prioritas diberikan pada pembentukan dan penguatan unit siber dan drone untuk melawan bahaya separatis. Pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan aksi terorisme yang sering dikaitkan dengan kegiatan subversif juga harus menjadi prioritas utama aparat keamanan. Taktik yang kuat dan tindakan tegas diantisipasi untuk menghalangi KST, yang menghambat kesejahteraan Papua. Ditekankan juga betapa pentingnya melibatkan masyarakat sekitar dalam penyelesaian konflik. Terlepas dari ancaman yang ditimbulkan, aparat keamanan secara aktif berpartisipasi dalam teritorial selain berkonsentrasi pada masalah keamanan. Diperkirakan bahwa Papua akan dapat mencapai keamanan yang sesungguhnya dengan strategi *Smart Power*.

Untuk mengelola situasi di Papua, evaluasi sangat penting, terutama mengingat serangan KST yang semakin parah. Dalam upaya untuk mengimbangi kekuatan militer dengan cara yang persuasif dan diplomatik, standarisasi sarana dan prasarana adalah salah satu langkah yang diambil untuk mendukung konsep *Smart Power* yang, sesuai dengan teori Joseph Nye, menggabungkan kekuatan *hard power* dan *soft power*. Dalam kasus di mana serangan KST menyebabkan korban jiwa, tindakan segera harus diambil, yang mencakup penggunaan kekuatan keras untuk menjaga keamanan dan upaya untuk membangun kepercayaan



masyarakat. Semua ini adalah bagian dari konsep *Smart Power*. Untuk mencegah KST, yang mengganggu kesejahteraan Papua, diperlukan strategi yang kuat dan tindakan tegas yang menggabungkan kekuatan keras dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Selain itu, ditekankan betapa pentingnya melibatkan masyarakat sekitar dalam penyelesaian konflik dan memperkuat pendekatan keamanan yang holistik, sesuai dengan konsep *Smart Power*, yang menekankan keseimbangan antara kekuatan keras dan lemah. Terlepas dari ancaman yang ditimbulkan, aparat keamanan secara aktif berpartisipasi dalam teritorial, sejalan dengan konsep *Smart Power*, yang mencakup pembangunan institusi dan partisipasi publik sebagai bagian dari strategi keamanan yang menyeimbangkan *hard power* dan *soft power* akan memungkinkan Papua untuk mencapai keamanan yang di inginkan.

Berbagai aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil baik penduduk asli maupun pendatang telah banyak dilakukan oleh KKB Papua ini sehingga menimbulkan keresahan dan kekacauan di wilayah Papua sendiri. Selain itu KKB Papua juga melakukan berbagai aksi bersenjata baik kepada masyarakat maupun aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang bertugas di Papua. Dari berbagai aksi yang telah dilakukan oleh KKB Papua tersebut telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia maupun luka-luka. Korban tersebut terdiri dari masyarakat sipil maupun Aparat keamanan TNI dan Polri. Dengan banyaknya aksi kekerasan dan penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh KKB Papua tersebut makin lama membuat masyarakat menjadi resah dan merasa ketakutan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik berkebun maupun berdagang, sehingga perekonomian Papua tidak bisa berkembang dengan baik dan normal. Kondisi tersebut tentunya menarik perhatian Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2021 menetapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah merupakan suatu Organisasi Teroris yang disebut dengan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP). Dengan penetapan tersebut, maka merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme di Indonesia, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa dilibatkan secara langsung dalam upaya pemberantasan separatis teroris di wilayah Indonesia, termasuk didalamnya adalah upaya mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata di Papua. Hal ini tentunya selaras dengan Tugas Pokok TNI yang diantaranya adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata dalam rangka menjaga kedaulatan seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penelitian terdahulu meneliti dengan situasi Papua yang masih memiliki beberapa wilayah yang rawan, Kotamaops TNI dalam hal ini Kogasgab Papua harus mengoptimalkan pelaksanaan operasi untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat wilayah Papua menjadi lebih kondusif sehingga pembangunan dapat dilanjutkan. Dibutuhkan upaya sistematis dan realistis untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi untuk mewujudkan wilayah Papua yang kondusif, mengurangi angka tindak kekerasan, dan mengurangi efek KST OPM. Kekerasan yang dilakukan KST OPM telah menyebabkan gangguan keamanan di wilayah, yang menghambat roda pembangunan, terutama di wilayah pegunungan tengah, dan menghancurkan sehingga mengatasi hal ini membutuhkan operasi kotamaops TNI.

Penting untuk dipahami bahwa separatisme dengan kekerasan sering kali berasal dari faktor inti yang rumit, seperti keresahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dalam kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, strategi yang sangat ketat dan berfokus pada kekuasaan sering kali tidak cukup efektif dari waktu ke waktu. Kemampuan metode *Smart*



*Power* untuk memasukkan solusi politik, pemulihan hubungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai komponen penting dari strategi kontra terletak pada hal ini. Penerapan Metode *Smart Power* bukannya tanpa kesulitan. Mencapai keberhasilan dalam mengadopsi ini membutuhkan kinerja yang efektif di antara personel keamanan, masyarakat, dan berbagai organisasi pemerintah. Keberhasilan juga bergantung pada pemahaman tentang konteks, dinamika konflik, dan hubungan antara berbagai individu yang terlibat dalam gerakan separatis bersenjata. Dalam hal ini, upaya untuk mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif dalam menghadapi gerakan separatis bersenjata harus mencakup penggunaan strategi dan upaya yang optimal..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Titik awal yang penting adalah mengeksplorasi landasan teori. Memahami ide, prinsip, dan aplikasi pendekatan *Smart Power* dalam konteks menghadapi gerakan separatis bersenjata di Papua membutuhkan landasan teori yang kuat. Informasi yang lebih luas tentang berbagai sudut pandang, model, dan strategi yang berkaitan dengan penanggulangan gerakan separatis akan tersedia melalui pemeriksaan landasan teori, serta bagaimana metode *Smart Power* dapat diikutsertakan dalam upaya-upaya ini. Oleh karena itu, membahas landasan teori merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan kasus yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang rumit di Papua.

Teori tentang *DOTMLPF-P*. *DOTMLPF-P* adalah alat yang memungkinkan untuk menganalisis kemampuan organisasi mereka dari perspektif "*Doktrin, Organization, Training, Materials, Employees, Facilities, and Policy*" ketika mengembangkan rencana strategis jangka panjang. Ini adalah etos kerja yang bertujuan untuk mendukung perubahan administratif atau peningkatan kesadaran yang akan mengurangi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi misi tertentu. Dalam menjalankan tesis "Pentingnya metode *Smart Power* guna menumpas gerakan separatis bersenjata dalam rangka mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif", empat komponen penting *Organization, Materials, Employees, Facilities* akan menjadi fokus penerapan teori *DOTMLPF-P*. Dalam rangka mendukung penggunaan teknik *Smart Power* dalam meredam gerakan separatis di Papua, teori ini akan memberikan kerangka kerja yang relevan untuk analisis dan perumusan rencana operasional. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana struktur organisasi, sumber daya material, SDM dan sarana prasarana dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan utama dari tesis ini-menciptakan wilayah Papua yang aman dan kondusif akan diperoleh dengan berkonsentrasi pada aspek organisasi, sumber daya material, SDM dan sarana prasarana. Oleh karena itu, penerapan teori *DOTMLPF-P* pada situasi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan taktik yang berhasil dan tahan lama.

*Organization* adalah Organisasi. Analisis organisasi memeriksa bagaimana TNI dan lembaga lainnya dalam bekerjasama menerapkan metode *Smart Power* guna menumpas gerakan separatis bersenjata dalam rangka mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif. *Materials* adalah Materiil. Analisis materiil memeriksa semua peralatan dan sistem yang diperlukan yang dibutuhkan oleh TNI untuk menerapkan metode *Smart Power* guna menumpas gerakan separatis bersenjata dalam rangka mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif. *Employees* adalah SDM: Analisis SDM memeriksa ketersediaan sumber SDM yang memenuhi syarat untuk menerapkan metode *Smart Power* guna menumpas gerakan



separatis bersenjata dalam rangka mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif. *Facilities* adalah sarana dan prasarana. Analisis sarana dan prasarana memeriksa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menerapkan metode *Smart Power* guna menumpas gerakan separatis bersenjata dalam rangka mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif.

Konsep *Smart Power*, Joseph Nye mendefinisikan kekuatan pintar pertama kali dalam bukunya "*Soft power. A Future for America*" (Einaudi, 2004), di mana ia mendefinisikan kekuatan pintar sebagai kemampuan untuk menggabungkan kekuatan keras dan lemah ke dalam strategi yang efektif, tergantung pada situasinya. Nye menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan, imbalan, dan pengaturan program aksi berdasarkan hal tersebut adalah apa yang disebutnya sebagai kekuatan keras, dan *soft power* adalah kekuatan halus. Kekuatan keras menimbulkan ketegangan, sedangkan kekuatan lunak menarik. Fakta bahwa *soft power* dan *hard power* bukanlah alat netral yang dapat digunakan secara terpisah adalah dasar dari pendekatan kekuatan pintar. Setiap institusi dan budaya institusional berbeda dan unik, dan masing-masing memengaruhi sikap, insentif, dan jalan karier anggotanya. Kekuatan yang cerdas berarti memahami kekuatan dan kelemahan alat ini. *Smart Power* adalah "keseimbangan antara *hard power* dan *soft power*", menurut Nye (2005). Dia berpendapat bahwa *soft power* sama pentingnya dengan *hard power* bahkan lebih penting dalam politik internasional. Dengan menggunakan persuasi dan daya tarik, *soft power* memungkinkan orang lain untuk mengubah perilakunya tanpa mengalami persaingan atau konflik. Selain itu, penggunaan *hard power* akan lebih mahal di era modern baik secara moneter maupun politis sementara penggunaan *soft power* dapat dianggap sebagai "bebas", yang berarti tidak membutuhkan banyak sumber daya dan memiliki konsekuensi yang terbatas jika gagal. Dia juga menunjukkan betapa pentingnya gaya karena *soft power* adalah masalah rayuan, perilaku seperti kesombongan mungkin tidak menguntungkan dan membuat orang jijik daripada menarik. Nye akhirnya menyadari bahwa *soft power* kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak perlu.

Teori Konflik, Selanjutnya Karl Marx memandang teori konflik sebagai bentuk pertentangan kelas, dia sering menjadi tokoh utama dalam berbagai diskusi tentang teori konflik sosial. Dari perspektif ini, Marx memasukkan gagasan struktur kelas ke dalam masyarakat. Dia melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan, atau ketidaksetaraan, yang dapat menyebabkan konflik dan perubahan sosial. Marx menganggap konflik di masyarakat terkait dengan adanya kelompok yang berkuasa dan memiliki kekuasaan. Marx menganggap konflik kelas sebagai hasil dari konflik kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini yaitu struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas-kelas yang berbeda, bagaimana kelas ekonomi memengaruhi gaya hidup seseorang dan konflik kelas memengaruhi perubahan struktur sosial. Menurut Novri Susan, dalam buku Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis (2009, hlm 22), perbedaan dalam akses ke sumber kekuasaan, yaitu modal, menyebabkan pertentangan kelas. Ada dua kelas yang saling bertentangan dalam masyarakat *kapitalis: borjuis* dan *proletariat*.

*Greed and Grievance Theory (Constructivisme)*. Merupakan dua argumen yang memberikan penjelasan umum mengenai penyebab terjadinya konflik dan perang sipil. *Greed* mengacu pada argumen bahwa penyebab awal perang sipil dimotivasi adanya peluang ekonomi untuk melakukan pemberontakan. Negara-negara yang mengalami ketergantungan struktural pada ekspor komoditas primer dan sumber daya alam lebih mungkin mengalami perang saudara akibat persaingan antar kelompok dan kelas masyarakat yang ingin menguasai aset-aset ekonomi tersebut. Di sisi lain, *Grievance* merujuk pada argumen bahwa penyebab awal perang sipil bukanlah karena peluang ekonomi, melainkan pemberontakan yang disebabkan



oleh kebencian yang melekat pada perbedaan etnis dan agama, ataupun kebencian objektif seperti dominasi mayoritas etnis, representasi politik, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan, dan penindasan.

*Original Sin.* Merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan tokoh realis Reinhold Niebuhr yang menyoroti kelemahan serta keterbatasan tertentu dalam sifat manusia yang mempengaruhi perilaku politik. *Original sin* mengacu pada dosa yang tidak bisa dihindari seperti mendahulukan kepentingan pribadi dan hasrat akan kekuasaan sehingga dapat menimbulkan konflik dan persaingan. Niebuhr mengasumsikan hubungan yang saling eksklusif antara alam dan tanggung jawab moral sehingga menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi sumber dosa dan karena itu manusia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang disebabkan oleh nasib yang tidak dapat dihindari tersebut. Dalam hal ini, teori *original sin* dapat digunakan untuk memahami perilaku negara dalam konteks konflik dan dinamika kekuasaan. Sebagaimana manusia, negara turut memiliki keinginan untuk mementingkan kepentingannya dan mengejar kekuasaan sehingga berujung pada timbulnya konflik dan persaingan.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan di Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Pemda Kabupaten Mimika. Metode pengumpulan data mencakup penggunaan alat seperti kuesioneri, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang dipilih sesuai dengan persyaratan dan fitur penelitian. Tahap ini sangat penting karena membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan atau argumen yang dibuat.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengerahan kekuatan Trimatra TNI Secara Terintegrasi. Salah satu komponen utama dari pendekatan *Smart Power* untuk melawan Gerakan Separatis Bersenjata di Papua adalah pengerahan personel Trimatra TNI yang terkoordinasi. Strategi ini memanfaatkan kekuatan gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk menghasilkan operasi militer yang efisien. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami bagaimana penggunaan teknik *Smart Power* didukung oleh koordinasi yang erat di antara berbagai kekuatan dan komponen TNI, serta sinergi dalam strategi dan taktik yang digunakan. Operasi teritorial, intelijen, tempur, dan dukungan merupakan bagian dari strategi ini, yang menggabungkan *hard power* dan *soft power*. Dengan menempatkan prioritas tinggi pada sinergi dalam metode dan taktik yang digunakan, pasukan Trimatra TNI dikerahkan secara terpadu sebagai bagian dari penerapan metode *Smart Power* untuk menumpas gerakan separatis bersenjata di Papua. Rencana ini sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Tanggung jawab TNI AD dalam operasi darat meliputi operasi penyergapan terhadap anggota kelompok separatis, patroli di daerah-daerah yang rawan, dan pengamanan fasilitas-fasilitas utama. TNI AL menjaga jalur perairan, menghentikan penyelundupan senjata, dan membantu logistik ke lokasi-lokasi terpencil yang sulit dijangkau



melalui jalur darat. Dukungan udara diberikan oleh TNI AU untuk sementara waktu untuk penerbangan pengintaian dan serangan terhadap lokasi-lokasi separatis. Operasi teritorial yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi wilayah, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses keamanan membangun sinergi antara strategi dan taktik. Penyediaan informasi strategis yang diperlukan untuk pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan operasi sangat terbantu oleh kegiatan intelijen.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kegiatan ini memerlukan penggunaan teknologi mutakhir untuk pengawasan, seperti drone dan satelit, serta transfer hasil analisis ke unit operasional. Untuk menghadapi ancaman langsung dari organisasi separatis ketiga matra TNI mengoordinasikan kegiatan tempur mereka. Untuk menjamin operasi yang efisien, operasi dukungan juga melibatkan perhatian medis dan layanan rehabilitasi. Menggunakan metode *Smart Power* menyoroti pentingnya kerjasama 3 matra TNI. Hal ini mencakup penggunaan kekuatan militer bersama dengan program pengembangan masyarakat untuk mencapai hasil jangka panjang. Untuk mengurangi ketergantungan pada angkatan bersenjata dan menjaga stabilitas jangka panjang, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga ditingkatkan. Staf perencanaan memainkan peran penting dalam koordinasi dan integrasi kekuatan Trimatra TNI dengan membuat rencana operasi yang melibatkan satuan tugas (Satgas) yang berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda pula, seperti Satgas Mobile yang berfokus pada pertempuran atau Satgas Pamtas Kewilayahan yang berfokus pada wilayah. Staf operasi juga berperan dalam menentukan strategi dan taktik yang mencakup pendekatan *soft approach*, *culture approach*, serta *hard approach*, dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Mulai dari pengumpulan informasi strategis dan analisis ancaman hingga dukungan informasi waktu nyata di lapangan, operasi intelijen mendukung semua fase operasi. Melalui pembagian informasi, analisis terpadu, dan perencanaan operasi gabungan, intelijen juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan koordinasi antara TNI dan komponen lainnya. Dalam penerapan operasi teritorial secara konstan bekerja sama dengan staf operasi dan entitas lain, seperti pemerintah daerah, untuk menyelesaikan tugas-tugas ketika melaksanakan operasi teritorial di Papua. Komponen penting dari strategi ini adalah pengembangan kesadaran masyarakat, gangguan terhadap jaringan logistik kelompok separatis, dan penciptaan gerakan perlawanan terhadap mereka.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Trimatra TNI berhasil diimplementasikan secara terpadu sebagai bagian dari penerapan metode *Smart Power* untuk menekan gerakan separatis bersenjata di Papua dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap sinergi dalam metode dan taktik yang digunakan. Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bagaimana sinergi terbaik dalam strategi dan taktik yang dihasilkan melalui kolaborasi yang erat antara Trimatra TNI dan komponen lainnya, seperti Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait. Operasi-operasi yang menggabungkan berbagai elemen, seperti operasi teritorial, operasi intelijen, operasi tempur, dan operasi dukungan menunjukkan keterpaduan ini. Dalam kerangka tujuan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara berbagai bentuk operasi dapat memfasilitasi pelaksanaan metode *Smart Power* yang efektif, yang menekankan pendekatan sosial dan diplomasi selain kekuatan militer untuk membangun stabilitas yang tahan lama. Keberhasilan strategi ini didasarkan pada operasi teritorial yang mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal, pembangunan infrastruktur, dan rehabilitasi wilayah. Pemanfaatan teknologi pengawasan yang canggih, seperti pesawat tanpa awak dan satelit, untuk mendukung operasi intelijen sangat penting untuk memberikan data yang tepat dan terkini yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan operasi.



Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antar elemen dalam operasi militer di Papua. Menurut penelitian sebelumnya, kelompok separatis bersenjata terus menjadi ancaman bagi Papua, menghambat perdamaian dan kemajuan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Kotamaops TNI, atau dalam hal ini Kogasgab Papua, perlu memaksimalkan operasi yang terkoordinasi dalam rangka menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan menciptakan situasi yang kondusif di Papua sehingga pembangunan dapat berjalan. Temuan penelitian ini, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, secara signifikan memajukan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan metode *Smart Power*. Penelitian sebelumnya biasanya menyoroti perlunya tindakan militer yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kekerasan dan menanggulangi dampak yang merugikan dari organisasi separatis bersenjata. Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana metode *Smart Power* yang terintegrasi dapat memberikan hasil yang lebih tahan lama dan lebih efisien. Penelitian ini menambah keyakinan terhadap gagasan bahwa mengelola konflik bersenjata di Papua membutuhkan upaya terkoordinasi yang melibatkan operasi teritorial, operasi intelijen, operasi tempur, dan operasi dukungan. Dengan menggunakan strategi ini, operasi mencoba untuk mengurangi dukungan masyarakat terhadap gerakan separatis dengan berkonsentrasi tidak hanya pada militer tetapi juga pada faktor pembangunan sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini secara signifikan memajukan metode *Smart Power* dari Joseph Nye. Dalam kerangka penelitian ini, penggunaan metode *Smart Power* di Papua menunjukkan bagaimana stabilitas jangka panjang dapat dicapai. Implementasi praktis dari teori ini menunjukkan bahwa operasi militer yang dikombinasikan dengan strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih berhasil dalam mencapai tujuan strategis, seperti membangun wilayah Papua yang aman dan menguntungkan. Metode *Smart Power* yang digunakan tidak hanya berkonsentrasi untuk mengalahkan lawan melalui operasi militer, tetapi juga untuk meningkatkan standar hidup masyarakat lokal dan mengembangkan infrastruktur, yang semuanya dapat berfungsi untuk melemahkan dukungan bagi organisasi separatis. Secara teoritis, penelitian ini menyoroti bahwa metode *Smart Power* membutuhkan koordinasi dan sinergi yang optimal antara berbagai komponen, seperti pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurut Nye, metode *Smart Power* bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengevaluasi situasi dan memilih instrumen yang tepat- ketika diperlukan. Hasil penelitian ini memvalidasi pentingnya analisis skenario dan persiapan yang cermat ketika menerapkan metode *Smart Power*. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi metode *Smart Power* dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan wilayah Papua yang aman dan kondusif melalui koordinasi terpadu antara Trimatra TNI dan pendekatan sinergis antara operasi teritorial, intelijen, tempur, dan dukungan. Dengan menekankan nilai kerja sama dan sinergi dalam skenario konflik yang kompleks seperti yang terjadi di Papua.

Anggaran, Organisasi, Personel, Materiil, dan Infrastruktur. Secara garis besar keterbatasan anggaran, organisasi, personel, dan sarana prasarana mempengaruhi penerapan metode *Smart Power* di Papua. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan operasi teritorial, intelijen, tempur, dan dukungan di Papua adalah keterbatasan anggaran. Perencanaan ke depan dan pelaksanaan tugas-tugas operasional seperti pengumpulan data dan dukungan logistik terpengaruh. Papua merupakan prioritas utama TNI, meskipun pengadaan logistik dan material masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Struktur organisasi yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk implementasi *Smart Power* yang efektif. Pembatasan organisasi mencakup hal-hal seperti koordinasi dan membuat pilihan berdasarkan seberapa



baik struktur komando bekerja. Masalah koordinasi juga dapat mempersulit operasi tempur, intelijen, teritorial, dan dukungan untuk bekerja sama secara sinergis. Hal ini dapat menyebabkan konflik tugas dan ketidakseimbangan dalam manajemen logistik. Mengenai personel, baik kuantitas maupun kualitas personel sangat penting untuk pelaksanaan metode *Smart Power*. Terlepas dari pelatihan yang sangat baik yang diterima, masih ada masalah dengan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan pelatihan personel. Yang terakhir adalah materiil karena efektivitas operasi dapat dipengaruhi oleh kendala material, terutama dalam hal akuisisi dan pemeliharaan peralatan, kendaraan, dan persenjataan yang memungkinkan operasi lapangan.

Penelitian ini secara efektif membahas masalah penelitian dengan menunjukkan bagaimana batasan yang berbeda mempengaruhi setiap aspek operasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan anggaran memiliki dampak khusus pada setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian pekerjaan. Keterbatasan organisasi dan tenaga kerja juga membahayakan koordinasi antar-layanan dan sinergi strategi dan taktik TNI. Hasilnya adalah kesesuaian yang kurang ideal antara tujuan operasi teritorial dan operasi tempur, intelijen, dan dukungan. Penelitian ini secara efektif membahas masalah penelitian dengan menunjukkan bagaimana batasan yang berbeda mempengaruhi setiap aspek operasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan anggaran memiliki dampak khusus pada setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian pekerjaan. Keterbatasan organisasi dan tenaga kerja juga membahayakan koordinasi antar unsur TNI dan sinergi strategi dan taktik TNI. Hasilnya adalah kesesuaian yang kurang ideal antara tujuan operasi teritorial dan operasi tempur, intelijen, dan dukungan. Hasil penelitian ini memvalidasi pentingnya mengkaji empat komponen utama: Organisasi, Materiil, Personel, dan Fasilitas, dalam kerangka teori yang digunakan, yaitu teori DOTMLPF-P (*Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, and Policy*). Secara khusus, kendala sumber daya organisasi dan material secara langsung mempengaruhi bagaimana solusi *Smart Power* diimplementasikan. Mengingat struktur komando yang rumit dan persyaratan untuk mengoordinasikan banyak kegiatan (teritorial, intelijen, tempur, dan dukungan) dalam satu kerangka kerja strategi terpadu, koordinasi antar organisasi merupakan kesulitan yang signifikan.

*Organization* (Organisasi). Struktur organisasi yang kuat diperlukan sebelum pendekatan *Smart Power* dapat dipraktikkan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kendala organisasi mempengaruhi sinergi dalam cara operasi dilaksanakan, terutama dalam hal koordinasi di antara dimensi TNI dan dengan komponen lain seperti pemerintah Daerah. Konflik dalam manajemen logistik dapat muncul dari komunikasi dan penyelarasan tugas yang buruk, yang membuatnya lebih sulit untuk mencapai tujuan operasional.

*Materiel* (Materiil). Ketersediaan dan pemeliharaan peralatan yang sesuai memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik fungsi operasi. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan pasukan untuk melaksanakan operasi di lapangan dibatasi oleh keterbatasan material, termasuk senjata, kendaraan, dan peralatan tempur. Ketidakmampuan untuk mendapatkan dan memelihara materiil ini menghambat upaya untuk stabilitas wilayah dengan menunda reaksi terhadap ancaman kelompok separatis.

*Personel* (SDM). Pertimbangan penting lainnya dalam implementasi metode *Smart Power* adalah kaliber dan jumlah personel. Masih ada batasan dalam distribusi sumber daya manusia dan kualifikasi, bahkan dengan pelatihan yang baik yang ditawarkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekurangan tenaga terampil, terutama di lokasi-lokasi



terpencil, dapat mengganggu efisiensi operasi, terutama dalam hal memperoleh informasi intelijen dan melaksanakan tugas-tugas penting. *Facillities* (Sarana dan prasarana). Pelaksanaan operasi di Papua semakin diperumit oleh kendala infrastruktur, seperti akses terbatas ke lokasi-lokasi tertentu. Kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan infrastruktur yang mendukung operasi teritorial, logistik, dan bantuan medis sangat penting agar operasi dapat berjalan dengan sukses, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. Pencapaian tujuan-tujuan penting dapat terhambat oleh operasi di lokasi terpencil yang menjadi lebih menantang dengan tidak adanya infrastruktur yang memadai.

Pembahasan ini menunjukkan bagaimana kendala anggaran, organisasi, personil, material, dan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan metode *Smart Power* dalam mengakhiri gerakan separatis bersenjata di Papua. Hasil penelitian ini secara signifikan menambah pengetahuan tentang bagaimana kendala-kendala tersebut berdampak pada cara operasi dilakukan dan bagaimana komponen TNI yang berbeda dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk mewujudkan stabilitas yang diinginkan di wilayah Papua. Penelitian ini menawarkan dasar yang kuat untuk menciptakan strategi operasional yang lebih berkelanjutan dan efektif dengan mempertimbangkan teori DOTMLPF-P. Konsekuensi praktisnya meliputi kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi, dan alokasi sumber daya untuk menjamin bahwa metode *Smart Power* dapat diimplementasikan seefisien mungkin untuk membangun zona yang aman dan menguntungkan di Papua.

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Kelompok Separatis. Topik ini berpusat di Kabupaten Mimika, Papua, di mana terdapat kesulitan komunikasi antara masyarakat, kelompok separatis, dan pemerintah daerah. Kabupaten ini menjadi fokus perhatian karena penyebaran pendekatan *Smart Power* untuk menekan gerakan separatis dan menciptakan zona aman dan kondusif dapat dipengaruhi oleh kondisi komunikasi yang sinergis atau tidak sinergis. Komponen penting dalam menggunakan metode *Smart Power* adalah komunikasi yang kooperatif antara Pemerintah daerah Kabupaten Mimika, masyarakat, dan kelompok separatis bersenjata. Untuk mengakhiri gerakan separatis bersenjata dan membangun lingkungan yang aman dan ramah, strategi ini menggabungkan operasi tempur, intelijen, teritorial, dan dukungan. Penggunaan metode *Smart Power* membutuhkan komunikasi yang kooperatif antara Pemerintah Kabupaten Mimika, masyarakat, dan organisasi separatis. Meskipun komunikasi sudah terjalin dengan baik, jika sinergi tidak dijaga, kemungkinan masalah tetap ada. Pembinaan yang efektif, koordinasi yang lebih baik, dan keterbukaan yang lebih besar adalah beberapa langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa penumpasan gerakan separatis berjalan sesuai rencana dan menghasilkan lingkungan yang aman dan ramah.

Dalam rangka menerapkan metode *Smart Power* dalam menumpas gerakan separatis bersenjata dan menciptakan zona aman dan kondusif, komunikasi yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Mimika, masyarakat, dan kelompok separatis sangat penting. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang efektif memungkinkan pembangunan berjalan tanpa hambatan yang berarti dari kelompok separatis. Semua pemangku kepentingan terkait harus berkoordinasi secara efektif dan memiliki pemahaman yang sama agar operasi satuan tugas dapat berhasil. Pemerintah Daerah mengadakan pertemuan rutin dengan penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama dalam menangani risiko. Selain itu, ikatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah diperkuat oleh peran Kesbangpol dalam mempromosikan ideologi dan wawasan kebangsaan serta transparansi



pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur publik dan bantuan langsung juga berperan dalam penurunan sentimen separatis. Secara keseluruhan, partisipasi aktif pemerintah dalam interaksi dengan masyarakat, komunikasi yang terbuka, dan transparansi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Mimika dan meredam gerakan separatis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *Smart Power* yang menekan gerakan separatis bersenjata dan menciptakan wilayah yang aman dan kondusif dapat dipengaruhi oleh ketiadaan komunikasi yang kooperatif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Papua, masyarakat, dan kelompok-kelompok separatis. Menurut temuan studi ini, komunikasi yang efisien dan kooperatif sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan metode *Smart Power*, yang mencakup operasi tempur, intelijen, teritorial, dan operasi pendukung lainnya. Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang kooperatif antara organisasi separatis, masyarakat, dan pemerintah daerah membantu efektivitas upaya terkoordinasi untuk menjaga keamanan Kabupaten Mimika. Pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan besar dari kelompok separatis jika ada komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menguntungkan di antara semua pihak yang terlibat. Subjek penelitian tentang bagaimana situasi komunikasi yang tidak sinergis dapat berdampak pada keberhasilan implementasi metode *Smart Power* juga berhasil dijawab oleh penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk atau terhambat dapat menyebabkan masalah yang signifikan dalam operasi, terutama ketika berinteraksi dengan organisasi separatis. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif dan komunikasi yang sinergis sangat penting untuk menjamin keberhasilan penerapan *Smart Power* di lokasi yang sensitif seperti Kabupaten Mimika.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang menyoroti betapa pentingnya komunikasi yang efisien untuk kegiatan militer dan keamanan di wilayah Papua. Menurut penelitian sebelumnya, kelompok separatis bersenjata sering melakukan aksi kekerasan di Papua, terutama di daerah sensitif seperti pegunungan tengah, yang membahayakan keamanan dan menghambat pembangunan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu elemen kunci yang dapat mendorong stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut adalah komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi separatis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kotamaops TNI, khususnya Kogasgab Papua, juga telah menyoroti pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan untuk menjaga kedaulatan negara dan menjamin kelancaran pembangunan di Papua. Pendekatan metodis dan praktis terhadap operasi militer yang menekankan pada koordinasi dan komunikasi yang efektif dipandang sebagai cara untuk mengurangi frekuensi kejahatan dengan kekerasan dan meredam pengaruh kelompok separatis. Dalam hal ini, Penelitian ini mendukung kesimpulan sebelumnya dengan menyajikan data konkret yang menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh komunikasi sinergis dalam keberhasilan penggunaan *Smart Power* di Papua. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan suasana yang kondusif, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok separatis harus bekerja sama lebih erat dan mengkoordinasikan upaya-upaya mereka. Untuk menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi kemungkinan konflik, Pemerintah Daerah harus mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan organisasi separatis. Untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bekerja sama dalam menangani risiko keamanan, pemerintah juga harus sering menjadwalkan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, seperti penegak hukum dan tokoh masyarakat.



Selain itu, hasil penelitian menyiratkan bahwa komunikasi yang sangat baik dan pembangunan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan sama pentingnya dengan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan metode *Smart Power* dengan sukses seperti halnya kekuatan militer. Di wilayah Mimika, pemerintah dapat mengurangi perasaan separatisme dan mendorong stabilitas dengan meningkatkan transparansi dan sinergi komunikasi. Berdasarkan temuan penelitian, Kesbangpol berperan aktif dalam mempromosikan ideologi kebangsaan dan pemahaman kebangsaan kepada masyarakat, yang memungkinkan pembangunan di Mimika berjalan dengan baik. Hal ini terungkap dari analisis komunikasi sinergis. Hal ini memperkuat argumen bahwa, khususnya di wilayah konflik. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa kepercayaan yang lebih besar dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah secara langsung dalam interaksi dengan masyarakat. Dari sudut pandang operasi, koordinasi yang lebih baik antara operasi tempur, intelijen, dan wilayah dimungkinkan oleh komunikasi yang efisien. Strategi ini sesuai dengan pendapat Joseph Nye bahwa kekuatan intelijen harus disesuaikan dengan situasi dan konteks masing-masing tempat. Telah ditunjukkan bahwa di Kabupaten Mimika, respon yang lebih fleksibel terhadap dinamika lokal-melalui komunikasi yang sinergis-meningkatkan efektivitas tindakan kooperatif terhadap organisasi separatisme. Selain itu, penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap gagasan bahwa komunikasi yang kooperatif dapat mengurangi resistensi kelompok separatisme dan mendorong implementasi kebijakan yang inklusif. Hasilnya, strategi *Smart Power* dapat dimodifikasi untuk mengatasi masalah internal seperti yang terjadi di Papua, selain berguna dalam konteks internasional. Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis bagi implementasi kebijakan keamanan dan pembangunan di wilayah Papua.

Pemerintah Daerah harus meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan forum-forum perdebatan secara rutin di mana perwakilan kelompok separatisme, pemerintah, dan masyarakat dapat berkumpul untuk mendiskusikan berbagai masalah. Forum-forum semacam ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, menyelaraskan sudut pandang, dan mencari solusi yang inklusif.

Pemerintah Daerah harus memasukkan strategi *Smart Power* ke dalam rencana pembangunan dan keamanannya. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa inisiatif pembangunan yang dilakukan di Papua memasukkan elemen-elemen seperti pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan kapasitas masyarakat di samping fokus pembangunan fisik. Strategi ini dapat membantu mengurangi keresahan komunal, yang sering kali menjadi pendorong gerakan separatisme. Kerja sama yang lebih baik di berbagai elemen operasi teritorial, intelijen, dan operasi tempur diperlukan dalam konteks operasi militer. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mempertahankan sinergi ini, baik secara internal di dalam kelompok-kelompok tugas maupun secara eksternal dengan masyarakat. Transparansi dalam cara operasi dilaksanakan dan komunikasi terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan kemungkinan konflik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengetahuan tentang bagaimana metode *Smart Power* yang diterapkan bersama dengan komunikasi yang sinergis dapat membantu menyelesaikan perselisihan separatisme di Papua. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efisien antara pemerintah dan organisasi separatisme, serta kombinasi dalam strategi yang fleksibel dan kontekstual, merupakan komponen



---

penting dalam operasi kooperatif yang bertujuan untuk mengakhiri gerakan separatis bersenjata.

Ancaman Keamanan dari Pihak-pihak yang Terlibat. Penggunaan metode *Smart Power* sangat penting untuk menciptakan keamanan di Papua. Menggabungkan *hard power* dan *soft power*, *Smart Power* dianggap sebagai cara strategis untuk mengatasi masalah keamanan yang kompleks seperti gerakan separatis bersenjata, potensi kekerasan, dan terorisme. Bagaimana kondisi ancaman keamanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, termasuk tindakan terorisme atau kekerasan, dapat mempengaruhi penggunaan pendekatan *Smart Power*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang di Papua, termasuk tindakan kekerasan dan terorisme, memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik metode *Smart Power* bekerja untuk menumpas gerakan separatis bersenjata. Menerapkan *Smart Power* dianggap sebagai cara strategis untuk menangani masalah keamanan yang menantang. Namun, pelaksanaan operasi teritorial di mana tindakan menjadi tergantung pada situasi dan kondisi daerah terkadang terhambat oleh risiko keamanan yang timbul dari tindakan kekerasan. Beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa bahaya-bahaya ini berdampak pada tujuan operasional dan taktik pelaksanaan, sehingga perlu adanya adaptasi metode *Smart Power* terhadap dinamika lokal. Ancaman terhadap keamanan seperti intimidasi atau serangan teroris dapat mempersulit perolehan informasi intelijen ke daerah konflik, mengurangi efektivitas pengumpulan informasi, dan menghambat pelaksanaan metode *Smart Power* seperti pengembangan masyarakat dan diplomasi. Membangun stabilitas dan keamanan di Papua semakin diperumit oleh ancaman fisik terhadap pasukan, gangguan komunikasi, dan gangguan terhadap teknologi intelijen. Strategi seperti polarisasi dalam masyarakat, trauma psikologis, pembubaran masyarakat, dan peningkatan kejahatan menunjukkan bagaimana bahaya ini mengikis kohesivitas sosial dan menghambat pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, penggunaan metode *Smart Power* dalam situasi ini membutuhkan kemampuan beradaptasi, dukungan intelijen yang kuat, dan pendekatan yang fleksibel terhadap realitas yang berubah di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode *Smart Power* secara signifikan dipengaruhi oleh risiko keamanan seperti tindakan kekerasan dan terorisme yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang di Papua. Masalah keamanan yang diakibatkan oleh aksi kekerasan dan terorisme sering kali menyulitkan penerapan strategi ini. Penerapan metode *Smart Power* dapat terhambat oleh risiko keamanan seperti polarisasi dalam masyarakat, serangan teroris, dan intimidasi, terutama dalam hal pengembangan masyarakat, pendidikan, dan inisiatif diplomatik. Penemuan ini langsung menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penggunaan *Smart Power* dalam konteks konflik di Papua sangat bergantung pada dinamika lokal dan situasi ancaman keamanan. Dukungan intelijen yang kuat, fleksibilitas, dan adaptasi yang cepat terhadap kondisi lapangan sangat diperlukan untuk keberhasilan *Smart Power*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu Yuniarti Dwi Pratiwi (2017), yang menyoroti pentingnya mematuhi hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dalam menangani gerakan separatis. Pratiwi menekankan bahwa setiap operasi militer, termasuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan hukum humaniter. Hal ini berkaitan dengan situasi di Papua, di mana pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter berpotensi mengintensifkan permusuhan dan merusak legitimasi tindakan militer. Penelitian

sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa perpaduan antara variabel politik, sosial, dan ekonomi sering kali menyebabkan kekerasan di Papua. Teori "*Greed and Grievance*" menjelaskan bahwa perang sipil sering kali dimotivasi oleh peluang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam (*greed*) dan kebencian terhadap ketidakadilan sosial, etnis, atau politik (*grievance*). Baik persaingan untuk menguasai sumber daya alam maupun ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial dan politik berdampak pada konflik dalam konteks Papua. Penelitian ini mendukung klaim tersebut dengan menunjukkan perlunya mengadaptasi metode *Smart Power* dalam situasi ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis dinamika konflik di Papua dan penerapan metode *Smart Power*, di antaranya adalah Teori Konflik, Teori "*Greed and Grievance*," dan Teori "*Original Sin*" (*Classical Realism*).

- a. Teori konflik. Membantu dalam memahami tekanan-tekanan yang mengarah pada konflik yang disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Konflik yang berlangsung lama di Papua berasal dari kesenjangan antara kelompok dominan dan kelompok yang terpinggirkan dalam hal representasi politik dan ketersediaan sumber daya. Menurut penelitian tersebut, *Smart Power* harus memasukkan taktik yang menangani penyebab konflik ini, seperti diplomasi yang sadar sosial dan inisiatif pembangunan yang inklusif.
- b. Teori "*Greed and Grievance*" (*Constructivisme*). Menunjukkan bagaimana sejarah penindasan dan identitas etnis, bersama dengan ketidakpuasan dan kebencian, merupakan penyebab utama konflik di Papua, selain iming-iming peluang ekonomi dan keserakahan. Hasil penelitian ini memvalidasi bahwa kedua faktor tersebut harus diperhitungkan dalam pendekatan *Smart Power*. Untuk mengurangi insentif keuangan yang memicu pemberontakan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Namun, rekonsiliasi sosial harus menjadi tujuan utama kebijakan teritorial dan taktik diplomatik.
- c. Teori "*Original Sin*" (*Classical Realism*). Berpendapat bahwa dorongan manusia untuk berkuasa dan kepentingan pribadi sering kali menjadi katalisator konflik dalam semua hubungan. Salah satu penyebab utama konflik di Papua adalah perebutan sumber daya dan otoritas. Menurut penelitian ini, *Smart Power* harus dapat menangani dinamika kekuasaan ini dengan menggunakan strategi yang memadukan kepemimpinan militer yang kuat dengan upaya-upaya yang mendorong perdamaian dan pengurangan ketegangan politik di bidang diplomatik.

Implementasi metode *Smart Power* di lapangan membutuhkan strategi yang sangat fleksibel dan responsif terhadap situasi lokal. Sifat ancaman keamanan yang dinamis, termasuk aksi terorisme dan kekerasan separatis, membutuhkan koordinasi yang lebih baik di antara unsur-unsur intelijen, teritorial, dan operasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Smart Power* dalam konflik Papua sangat bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, memahami kompleksitas konflik, dan menggabungkan taktik-taktik yang berbeda ke dalam rencana yang tepat. Perwujudan lingkungan yang aman dan kondusif di Papua membutuhkan kombinasi pengembangan masyarakat, aksi militer terkoordinasi, dan diplomasi untuk memadamkan gerakan separatis bersenjata.



---

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Elemen-elemen kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan operasi di lapangan adalah kerja sama Matra TNI yang ditingkatkan, sinergi strategi dan taktik, peran penting intelijen, inisiatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan kontribusi terhadap stabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa metode *Smart Power* yang mengintegrasikan Trimatra TNI dan memanfaatkan kekuatan kolektif dari beberapa operasi merupakan cara yang berhasil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Papua sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Peningkatan alokasi anggaran, peningkatan sarana dan prasarana lapangan, komando dan koordinasi yang dioptimalkan, pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dan implementasi metode *Smart Power* yang sukses adalah hal yang diperlukan. pemerintah daerah harus mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk membina kepercayaan dan komunikasi dengan kelompok-kelompok separatis dan masyarakat. Forum dialog rutin, penggabungan metode *Smart Power* dalam proses pembangunan, dan peningkatan koordinasi antara elemen-elemen yang terkait dengan operasi tempur, intelijen, dan manajemen wilayah, semuanya dapat membantu mencapai hal ini.

Penyebaran *Smart Power* di Papua harus sangat peka terhadap perubahan risiko keamanan, yang membutuhkan peningkatan kerja sama intelijen, wilayah, dan elemen operasional. Ketidakstabilan keamanan sering kali menyebabkan masalah dalam pengumpulan informasi dan pelaksanaan proyek. Taktik yang mudah beradaptasi dan fleksibel diperlukan untuk mengatasi hambatan ini..

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic Human Resources Management in the Global Era: Navigating Opportunities and Challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Sukmawati S, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Wilson Napitupulu. (2022), *Optimalisasi pelaksanaan operasi yang dilaksanakan Kotamaops TNI di Papua guna mengatasi ancaman bersenjata dalam rangka mendukung Tugas Pokok TNI*, Sesko TNI.



---

Yuniarti Dwi Pratiwi. (2017). *Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebuah (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)*,

## 2. Media Internet

Acqnotes, *DOTMLPF-P Analysis*, <https://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/dotmlpf-analysis>, diakses 12 Maret 2024.

Arif Mukti Ramadhan, *Objek Penelitian: Pengertian, Jenis, Prinsip, dan Cara Menentukan*, <https://ebizmark.id/artikel/objek-penelitian-pengertian-jenis-prinsip-dan-cara-menentukannya/> diakses 12 Maret 2024.

Dwi Latifatul Fajri, *Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian, Ini Penjelasan Lengkapnya*, [https://katadata.co.id/berita/nasional/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya#google\\_vignette](https://katadata.co.id/berita/nasional/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya#google_vignette), diakses 12 maret 2024.

DQlab, *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses 12 Maret 2024.

FIrdilla Kurnia, *Metodologi Penelitian: Pengertian Menurut Para Ahli, Manfaat, dan Jenisnya*, <https://dailysocial.id/post/metodologi-penelitian> diakses 11 Maret 2024.

Fungsi.com, *Wawancara Menurut Para Ahli, Syarat, Tujuan, Jenis Terlengkap!*, <https://fungsi.co.id/wawancara-menurut-para-ahli/> diakses 12 Maret 2024.

Kumparan.com, *Latar Belakang OPM, Gerakan Separatisme Papua*, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/latar-belakang-opm-gerakan-separatisme-papua-22LjPHeTg21/full>, diakses 16 Maret 2024.

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://uin-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses 2 April 2024.

Quipper, *Focus Group Discussion (FGD)*, <https://campus.quipper.com/kampuspedia/focus-group-discussion-fgd> diakses 2 April 2024.

Rina H, *Pengertian Subjek Penelitian dan 3 Contohnya*, <https://penelitianilmiah.com/subjek-penelitian/> diakses 12 Maret 2024.

Sindonews.com, *Sejarah Pemberontakan GAM dan Dugaan Keterlibatan Libya*, <https://nasional.sindonews.com/read/851961/14/sejarah-pemberontakan-gam-dan-dugaan-keterlibatan-libya-1660118903/10>, diakses 12 Maret 2024.

Salmaa, *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh*, [https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/#1\\_Silaen\\_2018](https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/#1_Silaen_2018), diakses 12 Maret 2024.



---

Techqualitypedia, *What is a Fishbone Diagram? Ishikawa Diagram | Cause & Effect Diagram*,  
<https://techqualitypedia.com/fishbone-diagram-ishikawa-diagram/>, diakses 12 Maret 2024.

Universitas Medan Area, *Apa Itu Gerakan Separatis? Pemahaman dan Implikasi Global*,  
<https://psikologi.uma.ac.id/apa-itu-gerakan-separatis-pemahaman-dan-implikasi-global/>, diakses 2 April 2024.

Wikipedia, *Proletariat*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Proletariat> diakses 2 April 2024.

Zaki Rif'an, *Soal Konflik di Papua, Panglima TNI Canangkan Pendekatan Smart Power*,  
<https://fajar.co.id/2023/11/22/soal-konflik-di-papua-panglima-tni-canangkan-pendekatan-smart-power/>, diakses 2 April 2024.

### **3. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang  
Pemberantasan Terorisme di Indonesia.